

Politik, Kekuasaan, dan Kekerasan Perspektif Hannah Arendt

Stanislaus Nugroho

ABSTRACT. Politics is not a simple word. Aristotle identifies it with human togetherness. In line with this identification, Hannah Arendt suggests that politics is not a kind of dominating actions, but the way in which the human beings promote freedom of actions in the public sector. The essence of politics, then, is communication. In this line of thought, power can be understood as one's ability to act/ behave with and within others/ in togetherness with others on base of a given mandate. Violence is nothing else but an anti-political stance of togetherness.

KATA KUNCI. Politik, kekuasaan, kekerasan, kebebasan, komunikasi

1. PENDAHULUAN

Setelah Orde Baru jatuh, pembicaraan tentang politik menjadi jauh lebih bersemangat. Selain karena banyak orang terjun ke dalam politik praktis, suasana politik akhir-akhir ini mengundang perhatian banyak orang yang memiliki kepekaan pada kepentingan banyak orang. Keterlibatan rakyat dalam pemilihan anggota DPR dan Presiden dan Wakil Presiden merupakan tanda-tanda peningkatan apresiasi masyarakat atas politik.

Gejala ini jelas positif, jika dibandingkan dengan situasi pada tiga puluh tahun yang lalu. Selain karena banyak orang tidak ambil bagian dalam politik praktis, tata kelola politik Orde Baru bersifat represif. Politik menjadi urusan elite tertentu yang memiliki hubungan dengan sentral-sentral kekuasaan. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 justru membuka elitisme politik itu dan membuka jendela bagi masyarakat untuk bersama-sama memikirkan kepentingan umum. Lebih mendasar dari itu, Reformasi telah membuka ruang bagi kebebasan warga negara untuk berbicara tentang kepentingan-

kepentingan mereka. Keterlibatan warga tersebut menunjukkan bahwa politik memang merupakan suatu kegiatan bersama, kegiatan yang tidak hanya melibatkan para politisi tetapi juga masyarakat biasa.

Tulisan ini merupakan hasil studi bersama mengenai hubungan kekuasaan dan kekerasan dalam konteks politik. Jika kita menelusuri hubungan antara kekuasaan dan kekerasan, ada hal yang menarik dari politik. Kekerasan memang tidak memiliki tempat dalam politik, namun ada tanda-tanda di mana kekerasan digunakan dengan motif politik. Kekerasan tak pernah lenyap dari politik; sesekali ia dapat muncul dalam pelbagai bentuk: rasialisme, imperialisme, dan bahkan terorisme. Karena itu, politik memiliki rentang yang amat sangat luas: dari yang sangat menghargai keadilan hingga yang menggunakan ancaman untuk tujuan-tujuan politik golongan.¹

Secara khusus tulisan ini memfokuskan diri pada pemikiran Hannah Arendt (1906-1975), seorang pemikir perempuan yang hidup dan berkarya pada abad ke-dua puluh. Pengalamannya akan kekerasan Perang Dunia II dan pelbagai refleksinya tentang pengalaman tersebut yang dituangkan dalam banyak buku menarik perhatian saya. Terutama yang menarik perhatian di sini adalah *On Violence*² dan *The Human Condition*³. Berangkat dari pemikirannya mengenai manusia sebagai makhluk yang tidak ada duanya, Arendt menegaskan konsep politiknya sebagai politik bagi masyarakat yang majemuk. Kemajemukan, demikian Arendt, merupakan hakekat kemanusiaan dan sekaligus fakta dasar untuk politik. Sementara itu, kekerasan merupakan lawan dari politik, yang harus dijinakkan, tidak dengan kekerasan tetapi dengan politik itu sendiri.

2. POLITIK

Salah satu *entry point* penting bagi pemikiran Hannah Arendt adalah pemikiran Aristoteles (384-322 s.M), seorang filsuf Yunani kuno yang turut mendidik raja Alexander Agung. Politik adalah kodrat manusia. Manusia, demikian Aristoteles berargumentasi, adalah *zoon politikon*, makhluk yang

berpolitik, yang hanya dapat mewujudkan dirinya secara aktual dengan berpolitik. Dengan perkataan lain berpolitik tidak lain berarti manusia mengaktualisasikan potensinya yang paling khas, dan itu terjadi dalam polis. Dengan berpolitik manusia memiliki tujuan untuk merealisasikan kebaikan tertinggi dan hidup bahagia bagi semua warga polis yang bebas.

Titik tolak pemikiran Aristoteles tidak dapat lepas dari struktur pemerintahan polis Yunani yang memberi ruang bagi laki-laki dewasa untuk berpolitik secara bebas di ruang-ruang publik. Karena itu ketika ia berbicara tentang manusia sebagai makhluk politik, Aristoteles memikirkannya sebagai sebuah kodrat universal yang berlaku di mana saja manusia berada. Hannah Arendt sedikit banyak mengikuti pemikiran Aristoteles tersebut di atas. Idealnya, politik harus dapat membangun sebuah kehidupan bersama di mana setiap warga dilihat sebagai manusia yang bebas. Namun, Hannah Arendt tidak melihat struktur politik seperti itu terjadi pada masa Perang Dunia II. Manusia tidak dengan sendirinya menjadi *zoon politikon*. Dengan mengikuti Heidegger, sang gurunya, Hannah Arendt melihat manusia selalu hidup dalam kondisi riil tertentu. Dan berpolitik adalah sebuah tugas unik yang harus dijalani oleh orang-orang bebas agar kehidupan bersama dapat terwujud. Jadi, tidak seperti Aristoteles yang melihat politik sebagai konsekuensi dari kodrat manusia, Hannah Arendt justru melihat politik sebagai tugas bersama untuk membangun dunia yang lebih baik.

Secara amat meyakinkan pemikiran Hannah Arendt tentang politik ini dijelaskan dalam *The Human Condition*, dalam perbandingan dengan kegiatan-kegiatan manusia lainnya. Sudah pada halaman pertama dari bukunya tersebut Hannah Arendt membagi kegiatan manusia-aktif menjadi tiga macam, yaitu kerja (*Arbeiten*), karya (*Herstellen*) dan tindakan politis (*Handeln*). Bagi Arendt 'kerja' merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap orang, agar ia bisa hidup. Lewat kerja, manusia mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya agar dapat hidup. Bekerja dalam pengertian ini hanya dapat dikaitkan dengan dunia privat. Nilai dan maknanya ditentukan oleh kondisi situasi sosial-budaya masing-masing masyarakat. Kerja bagi Arendt belum berkaitan dengan ruang publik, karena kerja ditandai dengan adanya keseragaman. Manusia,

pada tahap ini, tidak lebih dari ‘*animal laborans*’, di mana yang penting adalah bahwa proses bekerja dapat berlangsung dengan baik dan aman, begitu pula dalam proses mengkonsumsi dapat terjadi keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan.

Lain dari kerja, karya memainkan peranan yang unik. Karya, demikian Arendt, merupakan kegiatan manusia untuk memproduksi sesuatu yang berguna tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi sesamanya. Melalui karya-karyanya manusia membedakan dirinya dengan binatang, melipatgandakan dayanya berkat bantuan alat-alat dan perlengkapan-perengkapan kerja yang diproduksinya.

Arendt melihat pada tahap ini, manusia sudah membutuhkan orang lain. Karya sudah menuntut sebuah ruang publik, karena selalu menuntut kehadiran orang lain. Namun ruang publik yang dimaksud adalah pasar atau pertukaran. Pada tahap ini manusia tidak lagi menjadi sekedar *animal laborans*, tetapi sudah menjadi *homo faber*, makhluk produktif yang dapat menciptakan sesuatu yang baru: ciptaannya.

Bentuk kegiatan yang ketiga adalah aksi politik. Ini adalah aktivitas yang khas manusia. Arendt menulis:

Aksi politik merupakan satu-satunya kegiatan manusia yang menghubungkan secara langsung antar manusia tanpa perantara obyek maupun materi. Kegiatan manusia yang satu ini berhubungan dengan kondisi pluralitas manusia Jika semua segi kondisi manusia dalam arti tertentu berkaitan dengan politik, pluralitas ini merupakan corak khas dan mutlak kondisi seluruh kehidupan politik.⁴

Melakukan aksi (politik) tidak lain berarti bahwa manusia adalah makhluk yang mampu mengatur dan mengendalikan dunia. Lewat kegiatan politik manusia memperlihatkan bahwa dirinya mampu bertanggungjawab.

Selain itu bagi Arendt aksi (politik) merupakan ungkapan dari kemajemukan, di mana mereka yang berpolitik melakukan proses tawar menawar, persetujuan, penolakan, yang semuanya itu dilakukan dalam ruang publik⁵ lewat komunikasi verbal, lewat diskursus, kerja sama atau oposisi.

Singkat kata berpolitik bagi Arendt tidak lain berarti berkomunikasi, atau politik adalah komunikasi. Maka tidaklah mengherankan bila bagi Arendt yang menjadi ukuran keberhasilan seseorang dalam melakukan aksi (politik) adalah kebebasan (= mereka yang berpolitik mampu untuk menentukan dirinya dalam kebersamaan dengan yang lain) dan solidaritas (= melakukan aksi politik demi kebaikan bersama).

Elemen terakhir politik adalah suatu seni untuk mengabadikan diri. Maksudnya, berkat usaha mereka yang melakukan aksi (politik) yang bertanggungjawab terbangunlah kehidupan bersama yang harmonis, dan karenanya jasa-jasa tersebut tercatat dan diabadikan dalam sejarah. Namun, aksi politik tetap mengandung dua kelemahan.⁶ Kelemahan yang pertama adalah bahwa aksi politik tidak bisa diramalkan hasilnya. Kelemahan yang kedua adalah bahwa aksi politik yang tidak tepat tidak bisa diulang dari nol. Untuk itu Arendt menawarkan jalan keluar berupa ‘janji’ dan ‘pengampunan’. Janji berorientasi ke depan sedang pengampunan berorientasi ke belakang. Janji menumbuhkan harapan dan kepercayaan, sedang pengampunan ‘membebaskan’ pelaku aksi politik dari kesalahannya. Dengan demikian berpolitik bukanlah aksi untuk mendominasi, melainkan aksi kebebasan yang dilakukan bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti pers, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

3. KEKUASAAN

Kekuasaan memiliki dua wajah. Di satu sisi, politik menampilkan diri sebagai sesuatu yang memikat, mempesona sehingga banyak orang tertarik untuk dapat memilikinya. Namun, di lain sisi, politik dapat menampilkan sebuah wajah yang menakutkan dan mengerikan, khususnya bagi mereka yang dikuasai.

Dalam diskusi mengenai hakekat kekuasaan, Arendt menyadari bahwa banyak penulis menggambarkannya sebagai sesuatu yang menakutkan. Max Weber misalnya merumuskan kekuasaan sebagai “setiap peluang untuk

memaksakan kehendak sendiri dalam sebuah hubungan sosial, juga kalau kehendak itu ditentang.”⁷⁷ Kekerasan, demikian Weber, merupakan sarana yang dipakai oleh sang penguasa untuk memaksakan kehendaknya.

Hannah Arendt tentu tidak menyangkal dimensi koersif dari kekuasaan. Namun, ia juga melihat bahwa inti kekuasaan tidak dapat disamakan dengan kekerasan. Kekuasaan sebaliknya merupakan “solidaritas politis para warganegara.” Arendt menulis:

Kita tidak pernah tidak akan mengalami kekuasaan, jika kata-kata dan perbuatan-perbuatan saling terkait, jadi di mana kata-kata tidak kosong dan perbuatan-perbuatan tidak bungkam dan berubah menjadi kekerasan, di mana kata-kata tidak disalahgunakan untuk menyelubungi maksud-maksud, melainkan dikatakan untuk menyingkapkan kenyataan, dan di mana perbuatan-perbuatan tidak disalahgunakan untuk memperkosa dan menghancurkan, melainkan untuk menciptakan dan menetapkan hubungan-hubungan baru, dan dengan jalan itu menciptakan kenyataan-kenyataan baru.⁸

Dengan kalimat-kalimat di atas Arendt ingin melepaskan akar-akar kekerasan dalam kekuasaan, sekaligus menempatkan akar kekuasaan pada solidaritas sosial masyarakat. Karena inti dari solidaritas sosial itu adalah kebebasan, maka kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tidak dapat diabaikan dari tugas-tugas mengembangkan kebebasan tersebut. Inti relasi antara manusia dalam solidaritas sosial bukan dominasi tetapi saling menghargai sumber-sumber kebebasan pada tiap-tiap individu.

Untuk menjelaskan pemikiran dasar tersebut, Arendt membedakan kekuasaan dari kekuatan (= *strength*), daya (= *force*), otoritas (= *authority*)’ dan kekerasan (= *violence*).⁹ Kekuatan merupakan ciri individu. Ia tidak dapat bertahan bila berhadapan dengan ‘yang banyak (= rakyat)’. Sedang ‘daya’ memiliki hubungan dengan alam. Daya selalu diartikan sebagai kekuatan yang ada dalam alam. Jika gempa bumi mengguncangkan sebuah pulau dan membuat pulau tersebut tenggelam bersama seluruh isinya, gempa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kekerasan. Gempa hanyalah daya yang dimiliki alam yang

netral, yang tidak memiliki intensi untuk menghancurkan. Sebagai bagian dari alam, manusia pun dapat memiliki daya. Namun, daya yang miliknya bersifat netral. Ia dapat dilihat positif dan negatif; dan itu tergantung pada intensi pemiliknya dalam penggunaannya dalam relasi dengan manusia lain.

Berkaitan dengan relasi antara manusia, otoritas sudah dapat memainkan peranannya. Inti dari otoritas adalah relasi, karena itu ia tidak dimiliki oleh alam raya. Otoritas atau wewenang hanya dimiliki manusia yang memiliki kedudukan tertentu yang diakui oleh masyarakat. Dalam konsep otoritas kita bisa berbicara tentang relasi saling menghormati antar semua pihak yang terkait.

Hal ini berlaku juga dengan konsep kekuasaan. Sama seperti dalam konsep otoritas, kekuasaan hanya terjadi dalam relasi antara manusia. Kekuasaan mengacu pada kemampuan manusia, tidak hanya untuk menentukan dan melakukan sesuatu, tetapi juga menentukan dan melakukan sesuatu bersama orang-orang lain. Selain itu bila kita berbicara bahwa seseorang 'memiliki kekuasaan' maka dalam kenyataannya seseorang memiliki kekuasaan karena mandat yang diterimanya dari sejumlah orang, dan karenanya orang yang menerima mandat tersebut dapat bertindak atas nama mereka yang memberi mandat. Dengan demikian bagi Hannah Arendt kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bertindak dalam dan atas nama kebersamaan berkat mandat yang diterimanya. Tentang kekuasaan Arendt menulis:

Faktor terpenting dalam pengembangan kekuasaan adalah kebersamaan manusia. Hanya pada saat manusia hidup bersama, potensialitas aksi akan selalu hadir dan kekuasaan akan tetap bersama mereka, dan fondasi dari kota-kota, di mana konsep negara-kota tetap menjadi paradigma bagi seluruh organisasi politik barat, menjadikan faktor kebersamaan sebagai material yang mutlak bagi kekuasaan. Hal yang membuat manusia selalu bersama setelah masa aksi berakhir (yang sekarang disebut organisasi) pada saat yang sama, mereka tetap hidup dengan kebersamaan, yakni kekuasaan. Siapapun dengan alasan apapun, mengisolasi dirinya dan tidak ambil bagian dalam kebersamaan, menghancurkan kekuasaan dan menjadi tidak berguna,

meskipun dirinya kuat dan memiliki alasan yang valid.¹⁰

4. KEKERASAN

Dibandingkan dengan daya, otoritas, dan kekuasaan, kekerasan memiliki ciri instrumental. Kekerasan merupakan sarana yang digunakan oleh si penguasa untuk melipatgandakan kekuatannya (= *force*).

Dalam bab terakhir buku *On Violence*, Arendt mencoba menjelaskan kekerasan sebagai sesuatu yang irasional, tidak memiliki hubungan dengan kemampuan akal sehat, tetapi semata-mata bersumber pada naluri, perasaan yang tak terkontrol budi. Memang kita semua pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada orang bisa melakukan suatu tindakan (= dengan tahu dan mau) yang akan menghancurkan dirinya sendiri dan keluarganya serta orang-orang dan atau bangunan yang menjadi sasarannya? Padahal mereka yang menjadi korban biasanya bukanlah orang-orang yang terlibat baik langsung atau tidak langsung pada pokok yang dipermasalahkan. Mereka hanyalah orang-orang biasa.¹¹

Memang masalah kekerasan meninggalkan banyak pertanyaan dan ketidakpengertian. Johan Galtung mengajukan pertanyaan tentang kekerasan berkaitan dengan enam dimensi penting kekerasan dan akibatnya pada manusia, yaitu:

1. *Kekerasan fisik dan psikologis*. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan untuk meredusir kemampuan mental atau otak.
2. *Pengaruh positif dan negatif*. Sistem orientasi imbalan yang sebenarnya terdapat 'pengendalian', tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan euphoria.
3. *Ada obyek atau tidak*. Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis, meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.

4. *Ada subyek atau tidak.* Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu (strukturnya jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama.
5. *Disengaja atau tidak.* Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.
6. *Yang tampak dan tersembunyi.* Kekerasan yang tampak, nyata, baik yang personal maupun struktural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan, tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Kekerasan tersembunyi yang struktural terjadi jika suatu struktur egaliter dapat dengan mudah diubah menjadi feodal, atau evolusi hasil dukungan militer yang hirarkis dapat berubah lagi menjadi struktur hirarkis setelah tantangan utama terlewat¹².

Catatan Galtung yang terakhir, yang berkaitan dengan perubahan struktur egaliter menjadi feodal umpamanya, saya pikir sejalan dengan pendapat Hannah Arendt, bahwa berpolitik itu tidak lain adalah berkomunikasi. Orang hanya bisa sungguh-sungguh berkomunikasi kalau ada kesetaraan di antara mereka. Tanpa kesetaraan tidak mungkin ada komunikasi yang sebenarnya. Kalau tidak ada komunikasi maka tidak ada aksi politik. Maka tidaklah mengherankan bila Hannah Arendt berpendapat bahwa “Kekerasan tidak lain adalah komunikasi bisu *par excellence*.”¹³

5. HUBUNGAN ANTARA KEKUASAAN DAN KEKERASAN

Diskusi mengenai kekerasan politik sebagaimana dipaparkan di atas telah membawa kita kepada sebuah kesimpulan sementara bahwa tidak ada hubungan baik langsung maupun tidak langsung antara kekuasaan dan kekerasan. Kekuasaan merupakan kemampuan melakukan aksi politik dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. Namun, kesimpulan ini perlu diberi catatan bahwa kekerasan bukanlah sesuatu yang pantas disepelekan. Sebaliknya, kekerasan kerap digunakan sebagai sebuah sarana untuk memperoleh dan atau mempertahankan kekuasaan. Lalu, bagaimana persisnya hubungan antara kekuasaan dan kekerasan?

Hannah Arendt sendiri agak berhati-hati merumuskan pemikirannya tentang hal ini. Berikut adalah beberapa klarifikasi mengenai hubungan antara kekuasaan dan kekerasan.

Pertama, berkaitan dengan rumusan '*homo est animal rationale*.' Bagi Arendt rumusan ini perlu dimengerti secara tepat, karena kalau tidak, kita dapat terperangkap pada pandangan bahwa agresivitas manusia bisa dianggap sesuatu yang wajar karena manusia memang memiliki naluri kebinatangan. Lebih-lebih pandangan tersebut diperkuat dengan hasil-hasil studi ilmu empiris seperti yang dilakukan oleh Konrad Lorenz lewat bukunya yang berjudul *On Aggression*, New York, 1966. Menurut Arendt manusia melakukan kekerasan bukan karena manusia mirip binatang, melainkan karena manusia mampu untuk bertindak culas. Selain itu manusia mampu melakukan kekerasan karena manusia dapat kehilangan rasionalitasnya, dengan perkataan lain manusia tidak bisa mengendalikan emosi sehingga tidak mampu berpikir secara jernih.¹⁴

Kedua, bagi Arendt kekerasan tidak pernah bisa dilegitimasi, karena kekuasaan dan kekerasan saling bertolak belakang. Pada saat kekuasaan ada, maka kekerasan akan hilang. Maka bila negara melakukan kekerasan, negara tersebut telah gagal, atau dengan perkataan lain kekuasaan telah hilang.¹⁵

Ketiga, kekuasaan mengandaikan besarnya kuantitas dukungan. Semakin besar dukungan terhadap kekuasaan maka kekuasaan itu semakin

kuat. Di lain pihak kekerasan tidak membutuhkan kuantitas dukungan, melainkan membutuhkan kuantitas kepatuhan¹⁶.

Keempat, bila kita merefleksikan peristiwa tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, maka ketika kekuasaan yang sudah mulai tidak mendapat dukungan rakyat (dalam hal ini diwakili oleh kaum mahasiswa), maka yang terjadi adalah satu melawan semua. Dan ketika kekerasan digunakan sebagai sarana mempertahankan kekuasaan maka yang terjadi adalah peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi I dan peristiwa Semanggi II¹⁷.

Kelima, bagi Arendt baik kekuasaan maupun kekerasan bukanlah sesuatu yang alamiah, sebagaimana halnya daya.¹⁸ Kekerasan dan kekuasaan merupakan suatu pengejawantahan dari proses kehidupan manusia yang ditandai dengan kemajemukan dan perbedaan. Keduanya merupakan bagian dari aksi politik dalam kaitan dengan usaha pemenuhan kepentingan bersama atau pemenuhan kepentingan sektarian. Maka mutu dari semua pihak yang terkait dengan aksi politik menjadi sangat penting. Bila politik ditangani dengan mentalitas tingkat kerja di mana orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi – konsumsi sangat dominan, maka orang cenderung menjadikan politik tempat mata pencaharian utama. Jangan heran bila politikus yang masih berada dalam tahap-tahap orientasi miskin dalam visi dan misi politik. Apalagi keprihatinan untuk memperjuangkan penerimaan pluralitas. Sindrom yang menyertai politikus tingkat ini ialah mudah terlibat KKN. Selain itu, ia akan mengadopsi politik partisan demi penggalangan dukungan massa, sekuat tenaga mempertahankan posisi, bahkan bila perlu harus membayar dengan kebohongan dan kekerasan.¹⁹

Keenam, suatu pemerintahan akan tidak berperan secara baik bila pendekatan yang dilakukan sangat diwarnai oleh dominasi, di mana biasanya kekerasan dipakai sebagai sarannya. Akhirnya akan mengantar pemerintahan itu pada kegagalan.²⁰ Jadi, kekerasan memiliki kekuatan untuk merusak dan tidak manusiawi, yang akan menghasilkan ketidakberdayaan, dan akhirnya akan meruntuhkan kekuasaan itu sendiri.²¹

6. KESIMPULAN

Pemikiran Hannah Arendt tentang politik dan kekuasaan tidak dapat dilepas begitu saja dari pengalaman konkretnya tentang kekerasan politik pada masa Perang Dunia II. Arendt sendiri melukiskan pengalaman perang tersebut sebagai sebuah destruksi atas kemanusiaan.

Namun, refleksi filsafatnya membuat ia tidak pesimis terhadap politik dan kekuasaan. Justru dalam refleksinya ia mengangkat tinggi-tinggi makna politik dan kekuasaan sebagai manifestasi dari kehidupan bersama manusia. Bagi saya, hal ini tidak bisa lepas dari pemikirannya tentang ‘janji’ dan ‘pengampunan’. Dengan ‘janji’ Arendt tetap optimis akan masa depan yang lebih baik. Dengan ‘pengampunan’ Arendt tidak memiliki beban masa lalu yang membuatnya menjadi traumatis.

Pandangan mengenai janji dan pengampunan inilah yang membuat ia berpandangan positif tentang kekuasaan dan politik. Tetapi bagaimana politik dan kekuasaan dapat menjadi sebuah ruang bagi janji dan pengampunan itu sendiri? Arendt barangkali secara implisit ingin menegaskan bahwa yang paling utama dalam politik adalah kualitas manusia. Manusia politik harus mengetahui bahwa ia adalah pejuang bagi kebebasan dan demokrasi.

Tetapi bagaimana kita bisa berbicara tentang kualitas manusia dewasa ini, ketika politik berkolusi dengan uang? Dapatkah janji dan pengampunan akan tetap memiliki makna politis lagi? Memang Hannah Arendt hidup pada jaman di mana uang belum menjadi ilah dan belum menodai aksi politik. Karena itu politik memang menjadi sebuah harapan bagi kemanusiaan.

CATATAN AKHIR

- 1 *Kompas*, 19 Juli 2009, hal. 1.
- 2 Hannah Arendt, *On Violence* (New York : A Harvest Book, Harcourt Brace and Co., 1970).
- 3 Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago : The University of Chicago Press, 1958).

4 *Ibid*, hal. 41-42

5 Yang dimaksud Arendt dengan ruang publik adalah “ruang kebebasan politik dan kesamaan. Ruang publik tersebut tercipta bila warganegara bertindak bersama dalam koordinasi melalui wicara dan persuasi”.

6 Hannah Arendt, *The Human Condition*, *op.cit.*, hal. 236-247.

7 Dikutip oleh F. Budi Hardiman dari Max Weber, *Soziologische Grundbegriffe*, UTB, Tubingen, 1984, hal. 89 dalam bukunya *Memahami Negativitas. Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma* (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2005), hal. 31.

8 *Ibid*, hal. 31-32.

9 Hannah Arendt, *On Violence*, *op.cit.*, hal. 44-46.

10 *Ibid*, hal. 41.

11 Sebuah ilustrasi tentang kekerasan dan korban-korban kekerasan dapat kita baca komentar *Kompas*, ketika berbicara tentang terror yang terjadi di Jakarta pada pertengahan bulan Juli. “Selebihnya, kita masih diliputi perasaan galau, geram dan penasaran, dan tak habis-habisnya, mengapa aksi terorisme masih punya peluang di negara kita, yang notabene sudah menerapkan pengamanan ketat, dengan detektor logam di mal, hotel, dan perkantoran.” *Kompas*, tanggal 18 Juli 2009, hal. 6

12 Thomas Santoso (ed.), *Teori-teori Kekerasan* (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hal. 168-169.

13 Haryatmoko, *Etika. Politik dan Kekuasaan* (Jakarta : Penerbit buku Kompas, 2003), hal. 160.

14 Hannah Arendt, *On Violence*, *op.cit.*, hal. 59-61.

15 *Ibid.*, hal.52-56.

16 *Ibid.*, hal. 41.

17 *Ibid.*, hal. 42.

18 *Ibid.*, hal. 75-82.

19 Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, *op.cit.*, hal. 158.

20 Hannah Arendt, *On Violence*, *op.cit.*, hal. 53-54.

21 *Ibid*, hal. 80.

DAFTAR PUSTAKA

Arendt, Hannah. (1958). *Human Condition*. Chicago: The Chicago UP.

_____. (1970). *On Violence*. New York: A Harvest Book, Harcourt Brace and Co.

Budi Hardiman. F. (2005) *Memahami Negativitas. Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Thomas Santoso. (ed.), (2002). *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.